

DIAKUI UNESCO SEJAK 2012

Pemda DIY Belajar Subak di Bali

DENPASAR (KR) - Sistem irigasi Subak di Bali telah ada sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang, karena di jaga secara turun-temurun. Bahkan pada 2012 UNESCO telah menetapkan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia dan hingga kini masih konsisten dipertahankan.

Keberadaan Subak di Bali menjadi contoh baik karena sistem pengelolaan air menawarkan cara yang efektif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan pengelolaan dan pelestarian Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia, Pemda DIY mengadakan studi banding ke Balai Pelestari Nilai Budaya (BPNB) Wilayah XV Bali, Senin (27/5).

"Sejak penetapan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO pada 18 September 2023 dalam Sidang 'World Heritage Center' (WHC) ke-45 di Riyadh,



KR-Riyana Ekawati

Sekda DIY Beny Suharsono (kanan) bertukar cenderamata dengan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV Kemendikbudristek Abi Kusno.

Pemda DIY bergerak cepat mengambil langkah-langkah strategis. Di sisi regulasi, telah terbit Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2023 tentang Sekretariat Bersama Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta," kata Sekda DIY Beny Suharsono di Kantor BPNB Wilayah XV Bali.

Beny mengatakan, Kepgub tersebut sebagai fondasi untuk memastikan fungsi komunikasi,

penyiapan kebijakan dan strategi pengelolaan, koordinasi-integrasi perencanaan, operasional, monitoring, dan evaluasi serta mendukung fungsi pelaporan. Semua fungsi itu menjadi urgensi, karena atribut Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogya sangat dipengaruhi beberapa hal. Yakni adanya tekanan pembangunan, lingkungan, kesiapsiagaan bencana, isu pariwisata berkelanjutan

dan, eksistensi sosial-budaya masyarakat sekitar.

"Kami merasa tepat memilih Bali sebagai tujuan studi banding karena Subak telah lebih dulu ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia pada 2012. Bahkan sampai saat ini, tetap konsisten mempertahankannya. Kami berharap dengan kunjungan ini dapat menjadi sarana diskusi terkait pelestarian cagar budaya dan objek pemuatan kebudayaan," papar Beny. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV Kemendikbudristek Abi Kusno menyatakan, warisan budaya yang diakui UNESCO pada Subak bukan hanya pada sawahnya saja, melainkan unsur sistem yang membentuk lanskap area tersebut. Sebutnya filosofi cultural landscape Subak yang ada di Bali mirip dengan Warisan Budaya Dunia di Yogya yaitu Sumbu Filosofi.

(Ria)-d

Kloter

Sedangkan untuk Kloter SOC-54, dijadwalkan tiba di Bandara Jeddah pukul 20.30 Waktu Saudi Arabia. Sedangkan untuk kloter SOC-81 dan SOC-100 dijadwalkan berangkat dari Bandara Adisumarmo Solo 2 Juni dan 9 Juni 2024.

"Kami minta para jemaah untuk taat pada imbauan, seperti sudah menggunakan kain ihram, dengan segala syarat yang dipatuhi, misalnya tidak ada baju dalam saat memakai kain ihram," ujar Pembimbing Ibadah di Petugas Penyelenggara Haji Indonesia (PPBI) Arab Saudi Daker Bandara, H Mulyono.

Sementara itu, jemaah Haji Indonesia akan berada di Tanah Suci kurang lebih 41 hari. Selama tinggal di Tanah Suci, jemaah diimbau menghormati budaya setempat, baik dalam bermuamalah atau pergaulan dan dalam tata berpakaihan.

Sementara itu, Kemenag menyatakan sebanyak 17 orang calon haji Indonesia

meninggal dunia pada hari ke-16 operasional ibadah haji Indonesia, Senin (27/5). "Jemaah yang wafat hingga saat ini 17 orang," kata Petugas Media Center Haji (MCH) Widi Dwinanda.

Widi menjelaskan ke-17 orang tersebut meninggal di lokasi yang berbeda, di antaranya satu orang meninggal dunia di bandara, 13 orang di Madinah serta 3 orang di Makkah. Kemenag telah menyatakan seluruh calon haji yang meninggal dunia setelah masuk embarkasi dan sebelum keluar dari debarkasi akan mendapatkan asuransi dan akan dibadhlhajikan.

Jumlah tersebut, kata Widi, merupakan bagian dari sebanyak 109.898 orang calon haji Indonesia yang tercatat telah tiba di Arab Saudi.

Ia menjelaskan seluruh jemaah calon haji yang sudah tiba di Arab Saudi merupakan gabungan dari jemaah yang terbagi ke dalam 259 kloter.

Kenaikan

Kemendikbudristek dalam hal ini mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa. Permendikbudristek No 2 Tahun 2024 juga menekankan dua hal utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan UKT, yakni asas berkeadilan dan asas inklusivitas.

Sebelumnya, sejumlah miskonsepsi terjadi di tengah masyarakat. Sebenarnya, Permendikbudristek tersebut

Biaya

Bagaimana solusinya? Presiden terpilih Prabowo Subianto angkat bicara mengatasi kesulitan keuangan yang dialami oleh mahasiswa ini. Beliau mengatakan: uang kuliah seharusnya gratis. Tapi, semudah itukah membebaskan biaya kuliah? Tentu saja tidak.

Sebetulnya yang menjadi keluhan sebagian mahasiswa saat ini karena mahalnya biaya kuliah di PTN. Sebelum era reformasi, biaya kuliah di PTN lebih mahal dibanding di PTS. Namun sekarang, biaya kuliah di PTN sudah tidak kalah dibanding biaya di PTS.

Sebenarnya, kalau kita mau bicara kualitas pendidikan, banyak biayanya. Selain biaya hidup, ada biaya buku, biaya praktikum, biaya kegiatan (seminar, pelatihan, dsb). Sekarang ini, kuliah di Indonesia masih boleh dibilang belum serius. Saat ini ada tren negatif, yaitu mahasiswa tidak pernah pegang buku lagi ketika kuliah. Mereka hanya mengandalkan handout atau paparan PowerPoint dari dosennya, yang semuanya gratis, karena hanya dibagikan melalui jalur elektronik. Celakanya, hanya berbekal Ppt pun mahasiswa bisa lulus dengan nilai bagus. Jangan heran kalau daya analisis sebagian besar mahasiswa, terutama mahasiswa S1, relatif kurang memuaskan.

hanya berlaku bagi mahasiswa baru. Namun, ada kemungkinan PTN keliru ketika penempatan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonominya karena data yang diberikan mahasiswa tidak akurat.

Selain itu, ada segelintir PTN yang sebelumnya memiliki UKT rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari lima tahun, sehingga kenaikan UKT dirasa tidak wajar serta ada kesalahpahaman, kelompok hanya berlaku bagi mahasiswa baru. Namun, ada kemungkinan PTN keliru ketika penempatan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonominya karena data yang diberikan mahasiswa tidak akurat.

Selain kuliah, seharusnya mahasiswa juga aktif berorganisasi, tapi organisasi yang berkaitan dengan profesinya, bukan organisasi yang berkaitan dengan hobi atau minatnya. Ikatan Akuntan Indonesia sudah menyediakan jalur keanggotaan untuk mahasiswa, disebut Akuntan Muda, agar mereka bisa mengenal lebih awal dunianya kelak. Tetapi sayang, peminatnya pun masih sangat sedikit. Mahasiswa masih beranggapan bahwa organisasi mahasiswa ya berkaitan dengan pecinta alam, musik, olah raga, dan sejenisnya.

Siapa yang Membayar? Uang Kuliah Tunggal sejatinya tidaklah tunggal, karena ditetapkan berdasarkan kondisi perekonomian orangtua maha-

Para jemaah calon haji Indonesia, kata Widi, berada di Arab Saudi selama kurang lebih 41 hari. Selama waktu tersebut, para jemaah diimbau untuk tetap mengindahkan budaya setempat dalam pergaulan.

Beberapa hal di antaranya, seperti memakai pakaian yang menutup aurat, bersikap wajar terhadap lawan jenis yang bukan muhrim, memenuhi larangan dan ketentuan hotel serta tidak bersendawa di sembarang tempat, karena budaya setempat menilai perbuatan tersebut tidak baik.

Kemenag juga memperkenalkan aplikasi baru yang disebut 'Kawal Haji'. Staf Khusus Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo mengatakan, aplikasi ini dihadirkan sebagai bagian dari komitmen Kemenag untuk memudahkan akses jemaah dan masyarakat dalam menyampaikan beragam persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

(Jon/Ati)-d

Sambungan hal 1

UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa. Padahal secara keseluruhan, hanya 3,7% mahasiswa baru yang ditempatkan pada kelompok UKT tertinggi.

Pada bagian lain, Mendikbudristek menjelaskan, untuk tahun ini, tidak akan ada mahasiswa yang terdampak kebijakan kenaikan UKT. Sementara itu, pemerintah akan mengevaluasi satu persatu permintaan dari perguruan tinggi untuk peningkatan UKT tahun depan.(Ati)-d

Sambungan hal 1

siswa. Kalau memang orangtua tidak mampu, bisa saja UKT ditetapkan nol rupiah atau gratis. Namun penetapan ini hanya pada awal kuliah saja. Kalau di tengah kuliah tiba-tiba orangtua mengalami masalah keuangan, mahasiswa harus lapor ke kampusnya, namun harus disertai dengan berbagai dokumen pendukung. Sayangnya, lebih banyak mahasiswa yang memilih untuk meninggalkan bangku kuliah.

Yang juga perlu diperhatikan adalah jumlah mahasiswa di PTS. Meskipun UKT dianggap mahal, tetapi banyak PTN yang menerima mahasiswa dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dalam lima tahun terakhir, ada PTN yang menambah mahasiswanya hingga 17.000 mahasiswa, bahkan 25.000 mahasiswa, yang berarti tambahan 5.000 maba setiap tahun. Akibatnya, banyak PTS yang mengalami penurunan jumlah mahasiswa yang sangat signifikan. Pihak LLDikti pun menyarankan penggabungan PTS, padahal itu tentu tidak mudah.

Pertanyaannya memang tetap sama: uang kuliah mahal, lalu siapa yang harus membayar?

(Penulis adalah Dosen STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI DIY, penulis pu-luhan buku akademik)-d

Pengurus Baru DPD IKA UNY Dilantik

YOGYA (KR) - Dewan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta (DPD IKA UNY) melaksanakan pelantikan kepengurusan baru untuk periode 2024-2028. Ini menandai tonggak penting perjalanan organisasi dengan pengurus baru yang terdiri 29 anggota.

Melalui SK No 02/SK/DPP-IKA UNY/V/2024, kepengurusan baru diharapkan dapat membawa semangat baru dan ide segar untuk memajukan visi dan misi IKA UNY. Ketua Terpilih Syamsudin SPd MA mengatakan, regenerasi dalam tubuh organisasi sebuah hal yang sangat penting.

"Regenerasi adalah elemen krusial untuk memastikan keberlanjutan dan dinamika organisasi," ujarnya, Senin (27/5).

Ia juga berharap DPD IKA UNY dapat lebih menunjukkan kontribusi kepada masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan. DPD IKA UNY ber-



KR-Istimewa

Pengurus baru DPD IKA UNY periode 2024-2028.

komitmen untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan serta mengembangkan inisiatif baru yang lebih inovatif. Fokus utama tetap pada peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan program pelatihan.

Syamsudin percaya, kolaborasi dengan berbagai pihak akan menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu program utama

adalah pengembangan komunitas pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ketua DPP IKA UNY Prof Suyanto MEd PhD menekankan tiga pilar utama yang harus menjadi fokus pengurus baru, yaitu branding, pemberdayaan kenalan, dan pemberdayaan masyarakat. Branding yang kuat akan meningkatkan citra UNY, sementara pemberdayaan kenalan dan masyarakat adalah inti dari misi sosial IKA UNY.

(Hit)-d

Dituntut

Disebutkan, persidangan telah memeriksa 30-an saksi ditambah saksi ahli dan ad charge, serta pemeriksaan pada Terdakwa. "Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi dan berbelit-belit. Yang meringankan terdakwa mengembalikan dan belum pernah dihukum," jelasnya

Kasidi yang menjabat Lurah sejak 2021 dinilai melakukan pembiaran atas penyalahgunaan tanah kas desa seluas 39.600 m2 yang disewakan oleh terdakwa lainnya (sudah diputus pidana) Robinson Saalino, Direktur PT Indonesia Internasional Capital dan pemilik PT Komando Bayangkara Nusantara. "Gubernur belum memberi izin, pembangunan berjalan sementara terdakwa melakukan pembiaran bahkan menerima pembayaran dari pengem-

bang yang sudah menerima uang sewa dari konsumen," tutur Jaksa.

Atas tuntutan hukuman tersebut, Kuasa Hukum Kasidi Riyana Suharta SH dan Sita Damayanti SH dari Kantor Advokat Muslim SH MHum segera menyiapkan pledoi (pembelaan) yang akan dibacakan pada Jumat (31/5). "Tuntutan sungguh berat karena terdakwa sudah mengembalikan aset tanah desa sepenuhnya kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sebelum masuk penyidikan," jelasnya.

Sedang Kasidi yang sakit dan harus menjalani cuci darah merasa kecewa "Sebenarnya saya tidak sendiri, ada banyak aparat desa terlibat," ucapnya seraya menyebutkan beberapa nama aparat Kalurahan Maguwoharjo dengan jabatannya.

(Vin)-d

Pengemudi

Aan menambahkan adanya penyesuaian ujian SIM itu. Nantinya ada tiga jenis SIM sesuai dengan kompetensi masing-masing. "Ujian SIM C1 itu 250 - 500 cc, nanti berikutnya setahun yang akan datang, kita akan luncurkan SIM C2 itu 500 cc ke atas," katanya.

Sementara Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menyebutkan, salah satu perbedaan kapasitas mesin motor yang diukur centimeter cubic (cc). "SIM C itu sama dengan 0-240 cc. (SIM) C1 dari 250 sampai

500cc," katanya.

Kemudian perbedaan kedua yakni persyaratan, menurut Yusri bagi pengendara yang hendak memiliki SIM C1 diwajibkan memiliki SIM C yang berlaku minimal satu tahun. Selanjutnya adalah saat ujian mendapatkan SIM, salah satu yang membedakan dengan SIM C biasa dengan C1 adalah saat ujian praktiknya. "Trek SIM C1 mempunyai panjang hingga 2,5 meter, atau berbeda 1,4 meter dengan SIM C biasa, namun untuk ujian teorinya semua sama," jelasnya.

(Ant/Has)-d

Eksepsi

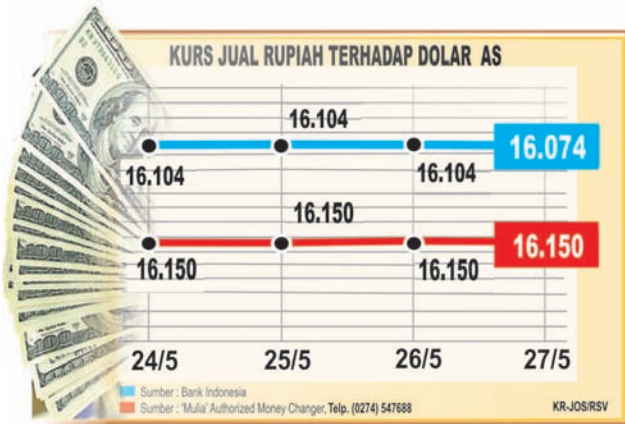
Namun Fahzal menegaskan, putusan sela yang diberikan Majelis Hakim tidak masuk kepada pokok perkara atau materi. Sehingga apabila Jaksa Penuntut Umum KPK sudah melengkapi administrasi pendelegasian wewenang penuntutan dari Kejaksaan Agung, maka sidang pembuktian perkara bisa dilanjutkan. "Jadi tidak masuk ke materi apa terdakwa Gazalba salah atau tidak, tidak sampai ke situ. Ini hanya syarat dari tuntutan, mempertimbangkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Agung RI," tuturnya.

Sebelumnya dalam nota keberatan, penasihat hukum Gazalba Saleh mengatakan alasan eksepsi diajukan lantaran penuntut umum pada KPK tidak menerima pendelegasian wewenang dari Kejaksaan Agung. Dengan begitu, berdasarkan asas sistem penuntutan tunggal dan dominus litis, penasihat hukum Gazalba

menilai hanya Jaksa Agung yang berwenang melakukan penuntutan dan sebagai penuntut umum tunggal, sehing-

ga pengendalian seluruh penuntutan perkara pidana merupakan kewenangan Jaksa Agung.

(Ant/Has)-d



Prakiraan Cuaca					Selasa, 28 Mei 2024	
Lokasi	Cuaca				Suhu °C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam	Dimi Hari		
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95
 Cerah	 Berawan	 Udara Kabur	 Hujan Lokal	 Hujan Pelir	Grafik: Alvin	

Gratis : Arko

Dr Junaidi, Sag MHum MKom
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

Bonus Demografi: Refleksi Filosofis

bahkan mungkin sedang menjalani masa-masa bonus demografinya. Secara sederhana, bonus demografi dapat diartikan sebagai momentum yang dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi suatu negara yang mengalaminya dikarenakan adanya transisi demografi yang mana menghasilkan jumlah usia produktif (kelompok muda) lebih besar dibandingkan jumlah usia non-produktif (kelompok tua).

Sejatinya, tidak ada fenomena yang menarik lebih banyak perhatian di abad ke 21 selain permasalahan populasi. Begituilah essay pembuka berjudul "How and Why Population Matters: New Findings, New Issues" yang ditulis oleh Birdsall & Sinding (2003)

dalam buku Population Matters Demographic Change, Economic Growth, and Poverty in the Developing World. Pertanyaannya adalah Pertama, akankah bonus demografi mendorong terjadi kesejahteraan atau malah sebaliknya? Kedua, apa saja ancaman terhadap bonus demografi di Indonesia?.

Dasar argumen kepentingan tulisan ini tidak hanya menyajikan analisis yang lebih reflektif sekaligus kritis, tetapi juga mengingatkan kembali jika mindset dan pemberdayaan bonus demografi bukan semata-mata soal logika ekonomi. Hal ini amat penting agar sisi lain kemanusiaan sebagai manusia Indonesia tetap eksis sebagaimana yang dirumuskan negara dan para pemikirnya.

Menarik asumsi yang dikemukakan oleh Mansurni Abadi & Nensy Setyaningrum bahwa diperkirakan pada tahun 2030, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 70% dari total populasi yang diperkirakan berjumlah 270 juta (Yamin et al., 2021) dan akan terus mencapai puncaknya pada tahun 2045 (Warsito, 2019) sebelum diproyeksikan menurun karena siklus stalled fertility decline menjadi 0,2% pada 2050, dimana ketika itu populasi Indonesia diperkirakan mencapai 321 juta sebagaimana yang tertuang dalam laporan Post 2015 Consensus (2015). Bonus demografi yang sedang dan akan mencapai puncaknya nanti di tahun 2045 akan menjadi peluang yang akan menentukan era baru Indonesia.

Pemikiran Sergey P. Kapitz (2006) dalam bukunya Global Population Blow Up and After the Demographic Revolution and Information Society menjelaskan bahwa faktor utama yang menentukan perkembangan kerja, kelahiran, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tingkat penduduk produktif akan menanggung penduduk non produktif. Maka penting sekali peningkatan solusi yang sistemis dan epistemik dalam multi bidang dan keahlian.

Untuk menghindari masa depan Indonesia yang distopia, tentu amat bergantung dengan berbagai faktor, baik yang datangnnya dari pemerintah berserta seluruh aparat kekuasaannya maupun rakyatnya secara

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

umum. Hanya karena Indonesia memiliki penduduk yang berada pada usia produktif lebih banyak, bukan berarti Indonesia sudah memasuki bonus demografi. Apalagi jika bonus demografi tidak diimbangi dengan investasi di bidang kesehatan, perbaikan terhadap program keluarga berencana, perluasan akses dan kualitas pendidikan, praktik pemerintahan yang baik, pasar tenaga kerja yang fleksibel, keamanan yang stabil, budaya ilmu, dan kesadaran terhadap literasi maka Negara ini hanyalah surplus orang muda secara kuantitas namun bukan secara kualitas. Semoga!.